

Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25 Piagam PBB

Julio Franco Jehovah Makarawung^{1*}, Richard Marsilio Waas²,
Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahlabetubun@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: UN Security Council Resolutions in the form of decisions of the UN Security Council relating to the preservation and/or restoration of global peace and security which can be implemented legally, are essentially a valid statement of international law mandated by the goals and principles of the UN as outlined in the UN charter.

Purposes of the Research: To analyze and find out about the Position of UN Security Council Resolutions according to Article 25 of the UN Charter.

Methods of the Research: Normative legal research or library legal research is a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctors to answer legal issues faced.

Results of the Research: The decisions of the UN Security Council are based on Article 25 of the Charter, which is truly legally binding, even more so that it can conflict with the principles of international treaty law, namely the principle of *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* because all these decisions can be binding on countries. Countries that are not members of the UN as stated in Article 2 paragraph (6) and Article 49 of the Charter. The position of the UN Security Council Resolution is binding not only on UN member states but also on non-UN member states as stated in Article 2 paragraph (6).

Keywords: Resolution; UN Security Council; United Nations Charter.

Abstrak

Latar Belakang: Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa sebuah Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan pelestarian dan/atau pemulihan perdamaian dan keamanan global yang dapat dilaksanakan secara hukum, pada hakikatnya merupakan gambaran pernyataan yang sah hukum internasional yang diamanatkan oleh tujuan dan prinsip-prinsip PBB yang dituangkan dalam piagam PBB.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan mengetahui tentang Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB menurut Pasal 25 Piagam PBB.

Metode Penelitian: Penelitian Hukum Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, perinsip-prinsip Hukum, maupun doktorin-doktorin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian: Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB didasarkan pada Pasal 25 Piagam yaitu benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* karena semua keputusan-keputusan itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 49 Piagam. Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6).

Kata Kunci: Resolusi; DK-PBB; Piagam PBB.

Kirim: 2024-03-23

Revisi: 2024-04-26

Diterima: 2024-04-28

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Julio Franco Jehovah Makarawung, Richard Marsilio Waas, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25 Piagam PBB." *BALOBE Law Journal* 4 no. 1 (2024): 42 - 50. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2051>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Piagam PBB merupakan salah satu bentuk Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional adalah sumber Hukum Internasional yang pertama dan utama.¹ Badan utama PBB seperti Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Sekretariat (*Secretariat*), Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic And Social Council*), dan Lembaga Khusus (*Specialized Agencies*), memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Misi Dewan Keamanan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan internasional yang timbul dengan mengambil keputusan berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pernyataan resmi atas keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sangat berbeda dengan resolusi badan-badan besar lainnya seperti Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*General Assembly Of The United Nations*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic And Social Council*) dan Dewan Pengawas. Keputusan ketiga badan utama tersebut bersifat keputusan yang mempunyai dua sifat, yaitu mengikat atau tidak direkomendasikan (*corporis inne*) dan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan (*externa corporis*).² Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa sebuah Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan pelestarian dan/atau pemulihan perdamaian dan keamanan global yang dapat dilaksanakan secara hukum, pada hakikatnya merupakan gambaran pernyataan yang sah hukum internasional yang diamanatkan oleh tujuan dan prinsip-prinsip PBB yang dituangkan dalam piagam PBB.

Resolusi sebagaimana yang dimaksud merupakan keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsesus maupun pemungutan suara yang berdasarkan aturan serta tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan.³ Resolusi Dewan Keamanan PBB pada dasarnya telah memiliki kekuatan mengikat didalam hukum internasional bagi para Negara anggota. Seperti yang tertulis pada piagam PBB pada Pasal 25 yang berbunyi "*The members of the United Nations agree to accep carry out decisions of the Security Council in accordance with present Charter*". Bunyi Pasal tersebut menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB berkesinambungan dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, maka para pihak yang terkait wajib untuk melaksanakan keputusan tersebut.⁴ Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu: "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance of international peace and security*". Berdasarkan Pasal tersebut, suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksankan dan terikat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu Tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

¹ Dyah Ridhul Airin Daties, *Hukum Internasional*, Bandung: Widina, 2021, h. 179.

² Mohn Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 75-79.

³ Ratu Sheeva Amandea dkk, Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Rana Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi*, Fakultas Hukum UNTIRTA, Banten, 2022, h. 29.

⁴ Huala, Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 99.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, perinsip-prinsip Hukum, maupun doktorin-doktorin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.⁵ Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai implikasi hukum jangka panjang. dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum di lingkungan masyarakat, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) penulisan hukum yang menawarkan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum bila dilihat dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melandasinya, atau pun bila dilihat dari nilai-nilai yang dianut dalam norma-norma suatu peraturan dalam hubungannya dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dewan Keamanan PBB Sebagai Badan Utama PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Fransisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II (*The Second World War*). Merupakan organisasi yang telah memiliki 192 negara sebagai anggotanya, penerimaan keanggotaan PBB tidak hanya memerlukan rekomendasi Dewan Keamanan, namun juga tetap harus diputuskan melalui dua per tiga suara Majelis Umum.⁶ Misi awal PBB adalah memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengatasi tantangan global. Seiring waktu, peran PBB berkembang untuk mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dengan 193 negara anggota saat ini, PBB terus menjadi platform utama bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerjasama dalam menghadapi masalah bersama.⁷

PBB sebagai organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara, mempunyai Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB (*Security Council*) yaitu salah satu dari enam organ utama pada PBB, negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam PBB. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Piagam PBB Pasal 24 bahwa: "*In order to ensure prompt and effective action by the united nations, its members confer on the security council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the security council acts on their behalf.*" (Untuk memastikan ketanggapan dan efektivitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan dan keamanan internasional, dan setuju dalam melaksanakan tugasnya dibawah tanggung jawab ini, Dewan Keamanan bertindak atas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, h. 35.

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Fakultas Hukum, Unpad, 2005, h. 20.

⁷ Annisa Medina Sari, *PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota (umsu.ac.id)*, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, dari: [https://www.bing.com/search?q=Annisa+Medina+Sari%2C+PBB+\(Perserikatan+Bangsa-Bangsa\)%3A+Sejarah%2C+Tujuan+dan+Anggota+\(umsu.ac.id\)&cvvid=9a9189b04b64469cb1079aff5cb5ed20&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYODIBCDEExNjFqMGoxqAIAA&FORM=ANAB01&PC=WSEDDB](https://www.bing.com/search?q=Annisa+Medina+Sari%2C+PBB+(Perserikatan+Bangsa-Bangsa)%3A+Sejarah%2C+Tujuan+dan+Anggota+(umsu.ac.id)&cvvid=9a9189b04b64469cb1079aff5cb5ed20&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYODIBCDEExNjFqMGoxqAIAA&FORM=ANAB01&PC=WSEDDB)

nama mereka). Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat dan paling strategis di PBB. Dasar hukum keberadaan unit ini tertuang dalam Bab V pasal 23 sampai pada pasal 32 Piagam PBB. Tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga dan pemeliharaan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh anggota dibawah program PBB. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat segera guna menjaga ketertiban dan perdamaian dunia apabila terdapat ancaman yang benar-benar nyata.

Mengacu pada Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki hak dan tanggung jawab, yakni:⁸ 1) Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara dua negara atau lebih; 2) Merupakan satu-satunya unit di PBB yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan; 3) Mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara-cara damai; 4) Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang tercapai; 5) Mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak bila sengketa telah menjurus kepada peperangan; 6) Melaksanakan langkah-langkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi, serta; 7) Mengirim pasukan-pasukan pemelihara perdamaian daerah-daerah sengketa.

Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh panitia staf militer, panitia pelucutan senjata, serta pasukan PBB. Secara struktural, Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, yakni 5 (lima) anggota tetap dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap. Mereka yang menyandang status sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki keistimewaan dalam bentuk hak veto, yakni hak untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional, digambarkan dalam skema berikut ini.

B. Resolusi Sebagai Instrumen Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan-badan utama seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi Sosial dalam sistemnya dapat mengeluarkan resolusi sendiri-sendiri. Namun demikian resolusi Majelis sifatnya hanya rekomendatif dibandingkan dengan resolusi Dewan Keamanan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Legal Binding*). Ini dapat terlihat pada Pasal 25 Piagam: "*The members of the United Nations agree to accept and carry out the decision of the Security Council in accordance with the present Charter.*" (Anggota PBB setuju untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini).

Resolusi itu dapat juga memberikan mandat, baik kepada Sekretaris Jenderal PBB maupun badan-badan Subsider PBB. Namun demikian dalam hubungannya dengan badan-badan khusus, resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum hanya bersifat rekomendatif saja. Hal itu disebabkan karena badan-badan khusus berdiri sendiri, tidak saja mempunyai anggaran sendiri, tetapi juga memiliki konsitusi sendiri. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB juga dapat meminta kepada negara anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam resolusi itu. Setelah resolusi itu disetujui oleh Majelis Umum, dalam rangka pelaksanaannya Sekretaris Jenderal selanjutnya menyampaikannya secara damai kepada negara anggotanya dalam waktu 15 hari setelah

⁸ Jabinson Purba & Boy Anugerah, Mendefenisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoritikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian, *Jurnal Kajian LemHANAS*, Maret 2019, h. 31-32.

penutupan persidangan Majelis Umum.⁹

Resolusi (*Resolution*) adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui *consensus* maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu Paragraph yang bersifat mukadimah (*Preambuler Paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional (*Operative Paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*Legal Validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB.¹⁰

Menurut *Black's Law Dictionary*, keputusan (*Decision*) dalam "*A determination arrived at after consideration of fact and, in legal context, law*" yaitu suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan "*Resolution: a formal expression of the opinion or will of an official body or a legislative resolution*"¹¹ yaitu bahwa resolusi adalah suatu pernyataan resmi tentang pendapat atau kehendak dari suatu badan resmi atau suatu majelis yang bersifat umum yang disahkan melalui pemungutan suara, sebagai suatu penyelesaian secara legislatif. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional¹² adalah: "Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata" Sumber hukum internasional sebagaimana dianut oleh para "maha guru" hukum internasional dapat ditemukan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, putusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum terkemuka merupakan tempat ditemukannya hukum internasional. Perjanjian Internasional atau konvensi-konvensi merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia.

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *Law Making Treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, sebagai contoh dapat disebutkan: 1) Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai; 2) *General Treaty for the Renunciation of War*, 27 Agustus 1928; 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945; 4) Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 dan Hubungan Konsuler 1963; 5) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan, 1977; 6) Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982; 7) Konvensi Senjata-senjata Kimia, (*Chemical Weapons Convention*), 1993; 8) *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), 1996.¹³

Sifat dari keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan utama lainnya

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, h. 30-31.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 1995, h. 173.

¹¹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, h. 407-1310

¹² Mochtar Kusumaatmadja, dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bandung, 2003, h. 2.

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003, h. 8.

seperti Majelis Umum PBB (MU-PBB), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan Dewan Perwalian, Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut bersifat resolusi yang mempunyai dua ciri yaitu Rekomendatif (*Interna Corporis*) dan bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (*Externa Corporis*)¹⁴. Sedangkan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB didasarkan pada Pasal 25 Piagam yaitu benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu yaitu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969) yaitu prinsip *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosumt* karena semua keputusan-keputusan itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB (negara yang tidak meratifikasi Piagam dan Statutnya) seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 49 Piagam.

C. Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional

Kekuatan hukum dari suatu resolusi organisasi internasional, telah lama menjadi suatu *kontroversial*. Meskipun demikian, resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memiliki peran yang penting dalam pembentukan hukum internasional.¹⁵ Bila kita mendiskusikan mengenai pengaruh resolusi dalam hukum internasional, kita perlu melihat kategorisasi yang dikemukakan oleh Sloan, yang mengidentifikasi tiga kategori utama resolusi, antara lain: a) Keputusan (*Decisions*) Berdasarkan Pasal 17 Piagam PBB, Majelis Umum dapat mengambil keputusan tentang masalah anggaran dan keuangan yang mengikat para anggotanya. Ketidak-patuhan terhadap keputusan anggaran dapat menyebabkan suspensi dan pengusiran dari keanggotaan. Selain itu, Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB menetapkan bahwa semua anggota harus memberikan PBB bantuan penuh dalam segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberi bantuan kepada negara manapun yang oleh PBB dilakukan tindakan pencegahan atau penegakan. Jadi dapat dikatakan, resolusi PBB yang berkomitmen untuk mengambil 'tindakan' dapat mengikat hegarnegara anggota; b) Rekomendasi (*Recommendations*) Pasal 10 Piagam PBB mengatur bahwa Majelis Umum dapat mendiskusikan persoalan-persoalan mengenai hal-hal dalam ruang lingkup Piagam PBB. Disamping itu Majelis Umum PBB juga dapat membuat rekomendasi kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kepada Dewan Keamanan, atau keduanya, pada setiap persoalan atau masalah. Esensi dari 'rekomendasi' adalah bahwa mereka tidak mengikat. Namun, rekomendasi yang terbukti digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh negara-negara akan dengan sendirinya membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya akan menjadi hukum internasional; c) Deklarasi (*Declarations*) Deklarasi adalah salah satu spesies resolusi Majelis Umum PBB yang didasarkan pada Bab IV dari Piagam PBB. Deklarasi bukanlah rekomendasi dan tidak berlaku atau dievaluasi layaknya suatu rekomendasi.¹⁶

Sejak tahun 1945, Majelis Umum telah melahirkan sejumlah deklarasi yang telah menciptakan banyak prinsip-prinsip hukum internasional. Deklarasi pada umumnya lahir oleh suara bulat dari anggota atau oleh konsensus (yaitu tanpa pemungutan suara). Contoh deklarasi yang paling komprehensif dan menjadi prinsip-prinsip umum hukum internasional, antara lain: *Declarations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among states*, GA Resolusi 2625 (XXV) Tahun 1970. Deklarasi penting lainnya adalah Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Wilayah Kolonial dan Masyarakat/ *Declaration on the Granting Independence to Colonial Territories and People* (GA Resolusi 1514 (XV) Tahun 1960.¹⁷ Resolusi-resolusi yang merupakan deklarasi tersebut telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip umum hukum

¹⁴ Barros, James. *United Nations, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H. Gulo, PBB, *Dulu, Kini dan Esok*, Edisi Kedua Bumi Jakarta: Aksara, 1990, h. 103.

¹⁵ Tim Hillier. 'Sumber Hukum Internasional Publik', Londong: Cavendish, 1998, h. 96.

¹⁶ A. Leovaldi Tirta, *Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional*, Jurnal YUSTIKA, Volume 14 Nomor 1 Juli 2011, h. 95-96.

¹⁷ Tim Hillier, *Op. Cit.*

internasional saat ini, oleh karena itu, dalam situasi tertentu resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat hukum internasional.¹⁸

D. Kekuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai Sumber Hukum Internasional

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Piagam, untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) kepada Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bertindak atas nama anggota. Dewan Keamanan PBB juga terikat oleh tujuan dan prinsip-prinsip PBB dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya (Pasal 24 ayat (2) Piagam), sehingga pada prinsipnya Dewan Keamanan PBB tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pada saat yang sama, anggota-anggota PBB terikat oleh tindakan Dewan Keamanan PBB dan menurut Pasal 25 Piagam, mereka "setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam", sehingga resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Legally Binding*).

Kekuasaan Dewan Keamanan PBB yang begitu besar ini dapat menimbulkan suatu kekuasaan yang *eksepsional*/luar biasa dan luas yang kadang-kadang di luar kekuasaan yang ditetapkan oleh Piagam (*ultra vires*) bagi Dewan Keamanan PBB. Hal ini bisa terjadi dengan dalih untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Walaupun begitu, tidak berarti kekuasaannya itu tidak terbatas melainkan tetap mempunyai pembatasan-pembatasan secara hukum. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB hanya dapat bertindak atas dasar ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 24 ayat (2) Piagam, Pasal 1 ayat (1) Piagam dan Pasal 2 ayat (7) Piagam.¹⁹

Prosedur pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB dalam Pasal 27 Piagam. Setiap anggota Dewan Keamanan PBB berhak memberikan satu suara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Piagam. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai masalah-masalah *procedural* harus ditetapkan dengan suara setuju (*affirmative*) dari sembilan anggota (Pasal 27 ayat (2) Piagam), sedangkan untuk masalah-masalah lainnya (*non-procedural*) ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota Dewan Keamanan PBB dengan syarat adanya kesepakatan suara dari lima anggota tetap, dengan ketentuan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka Bab VI dan Pasal 52 ayat (3) Piagam, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara (Pasal 27 ayat (3) Piagam).

Prosedur pemungutan suara terdapat perbedaan antara prosedur-prosedur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Piagam, yang terletak pada perbedaan antara "masalah-masalah *procedural*" dan "semua permasalahan lain", tetapi tidak terdapat penjelasan rinci mengenai masalah-masalah apakah yang termasuk dalam kedua kategori ini jika dibandingkan dengan penjelasan mengenai "masalah-masalah penting" dalam Pasal 18 Piagam yang menyangkut pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB. Dengan demikian Dewan Keamanan PBB dihadapkan pada persoalan untuk memutuskan mengenai ke dalam kategori mana suatu keputusan tertentu harus dimasukkan. Dalam praktek beberapa masalah tertentu yang ditetapkan sebagai masalah *procedural* adalah keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda, penangguhan sidang-sidang, pelaksanaan kerja, undangan kepada negara-negara untuk ikut serta dalam sidang-sidang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi II*, Bandung: Alumni, 1997, h. 203.

dan penundaan pertimbangan atas suatu permasalahan.²⁰

Keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam hal ini jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara diambil oleh Dewan Keamanan PBB maka negara lain baik anggota maupun tidak anggota PBB yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut (Pasal 50 Piagam). Dengan demikian suatu keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan mengikat baik bagi anggota PBB maupun bukan anggota PBB. Hal ini bertentangan dengan prinsip Perjanjian Internasional (Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberi hak dan kewajiban kepada pihak ketiga (*Pacta Tertiis Nee Nocent Nee Prosunt*), tetapi ketentuan tentang keputusan Dewan Keamanan PBB adalah mengikat sudah diterima sebagai Prinsip Hukum Internasional. Ketentuan tersebut telah dijamin oleh Pasal 2 ayat (6) Piagam yang menyebutkan bahwa "negara-negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional". Jadi negara yang bukan anggota PBB terikat oleh keputusan Dewan Keamanan PBB apabila keputusan tersebut bertujuan untuk perdamaian dan keamanan internasional.

KESIMPULAN

Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat terlihat dalam Pasal 25 Piagam PBB yaitu: "*The members of the United Nations agree to accept and carry out the decision of the Security Council in accordance with the present Charter.*" (Anggota PBB setuju untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini). Resolusi Dewan Keamanan PBB benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu yaitu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969) yaitu prinsip *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* karena semua keputusan-keputusan itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB (negara yang tidak meratifikasi Piagam dan Statutnya).

REFERENSI

Artikel Jurnal

Amanda Sheeva Ratu dkk, (2022), Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Rana Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi*.

Purba Jabinson & Anugerah Boy, (2019), Mendefenisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoritikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian, *Jurnal Kajian LemHANAS*.

Tirta Leovaldi A., (2011), *Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional*, *Jurnal YUSTIKA*, Volume 14 Nomor 1 Juli 2011.

²⁰ D. W. Bowett. *The Law of International Institutional*, diterjemahkan oleh Dja-jaatmadja, Bambang Iriana, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 35.

Buku

- Barros, James, *United Nations, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H. Gulo, PBB, *Dulu, Kini dan Esok*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Black, Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing, 1990.
- Bowett W. D., *The Law of International Institutional*, diterjemahkan oleh Dja-jaatmadja, Bambang Iriana, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Daties Airin Ridhul Dyah, *Hukum Internasional*, Bandung: Widina, 2021.
- Hillier Tim, '*Sumber Hukum Internasional Publik*', London: Cavendish, 1998.
- Huala, Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusumaatmadja Mochtar, dan Agoes R. Etty, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 1995.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Fakultas Hukum, Unpad, 2005.
- Suryokusumo Sumaryo. (1997), *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi II*, Bandung: Alumni, 1997.
- Tsani Burhan Mohn, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Sari Medina Annisa, (2024), [https://www.bing.com/search?q=Annisa+Medina+Sari%2C+PBB+\(Perserikatan+Bangsa\)%3A+Sejarah%2C+Tujuan+dan+Anggota+\(umsu.ac.id\)&cvid=9a9189b04b64469cb1079aff5cb5ed20&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNjFqMGoxqAIAsAIA&FORM=ANAB01&PC=WSEDDDB](https://www.bing.com/search?q=Annisa+Medina+Sari%2C+PBB+(Perserikatan+Bangsa)%3A+Sejarah%2C+Tujuan+dan+Anggota+(umsu.ac.id)&cvid=9a9189b04b64469cb1079aff5cb5ed20&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNjFqMGoxqAIAsAIA&FORM=ANAB01&PC=WSEDDDB)

